



PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
(PKP2A IV LAN - ACEH)

PROSIDING SEMINAR



Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

I

1 Nopember 2012

Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

PUSAT KAJIAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (PKP2A IV LAN-ACEH)
Jalan T. P. Nyak Makam No. 12, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telp. (0651) 7552569 - Fax. (0651) 7552568

ISBN 978-602-19211-04



Prosiding Seminar Nasional
Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik

Penyelenggara

Drs. H. Dermawan, MM

Tim Penyusun/Penulis

Henri Prinato Sinurat, S.IP.

Ervina Yunita, S.Si

Rati Sumanti, S.Sos

Edy Saputra, SH

Editor

Ir. Faizal Adriansyah, M.Si

Lembaga Administrasi Negara.
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV.
Prosiding Seminar Nasional Reformasi Birokrasi Menuju Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik/tim penyusun, Faizal Adriansyah ... [et al . .];
editor, Faizal Adriansyah. -- Banda Aceh: Pusat Kajian dan Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur IV LAN, 2012.

15 x 22 cm; v + 50 hlm

ISBN 978-602-19211-04

1. Administrasi Negara - Seminar
I. Judul. II. Faizal Adriansyah.
III. Faizal Adriansyah.

Diterbitkan oleh:
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV
LAN (PKP2A IV - LAN)

Kata Pengantar

Seminar Nasional dengan tema *Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik* yang diselenggarakan oleh PKP2A IV LAN adalah sejalan dengan semangat reformasi yang mengamanatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Setiap instansi pemerintah dituntut mampu menciptakan aparatur yang bersih dari segala bentuk penyimpangan/pelanggaran baik yang terjadi pada aparatur pemerintah pusat/daerah. Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain disebabkan oleh lemahnya penerapan fungsi manajemen secara konsisten dan bertanggungjawab, rendahnya disiplin dan kinerja sumber daya manusia aparatur, lemahnya fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah, sistem karir berdasarkan prestasi kerja belum sepenuhnya diterapkan, gaji yang belum memadai untuk hidup layak, dan lemahnya sistem pertanggungjawaban publik yang kemudian berakibat rendahnya kualitas pembangunan.

Secara empirik kinerja birokrasi menunjukkan kecenderungan yang belum efektif dan efisien, hal ini dapat dilihat dengan masih rendahnya kualitas pelayanan publik, pelayanan yang terlalu birokratis, rendahnya akuntabilitas, kurang responsif dan akomodatif terhadap tuntutan dan dinamika masyarakat.

Banda Aceh, Desember 2012
Kepala PKP2A IV LAN

Drs. Dermawan, MM
NIP. 195901261983031005

Daftar Isi

KATA PENGANTAR — *iii*

DAFTAR ISI — *v*

BAB I PENDAHULUAN — 1

A. Latar Belakang — 1

B. Maksud dan Tujuan — 2

C. Pembicara — 2

D. Pelaksanaan Kegiatan — 2

BAB II LAPORAN SEMINAR — 3

A. Sambutan-Sambutan — 3

B. Makalah — 13

C. Makalah Pendamping — 28

D. Tanya Jawab — 35

BAB III PENUTUP — 38

DOKUMENTASI KEGIATAN — 40

BIOGRAFI NARASUMBER — 47

LAMPIRAN — 49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi yang telah berjalan sejak tahun 1997 terutama di bidang politik, ekonomi dan hukum telah merubah banyak aspek sistem pemerintahan Indonesia. Arah dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, melalui penegakan hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik, perubahan *mind-set* dan *culture-set*, serta perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, menjadi lebih produktif, efisien dan efektif.

Sejalan dengan semangat reformasi yang mengamanatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, setiap instansi pemerintah dituntut mampu menciptakan aparatur yang bersih dari segala bentuk penyimpangan/pelanggaran baik yang terjadi pada aparatur pemerintah pusat/daerah. Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain disebabkan oleh lemahnya penerapan fungsi manajemen secara konsisten dan bertanggung jawab, rendahnya disiplin dan kinerja sumber daya manusia aparatur, lemahnya fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah, sistem karir berdasarkan prestasi kerja belum sepenuhnya diterapkan, gaji yang belum memadai untuk hidup layak, dan lemahnya sistem pertanggungjawaban publik yang kemudian berakibat rendahnya kualitas pembangunan. Untuk dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan tersebut, diperlukan suatu pola penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur hubungan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Secara empirik kinerja birokrasi menunjukkan kecenderungan yang belum efektif dan efisien, hal ini dapat dilihat dengan masih rendahnya kualitas pelayanan publik, pelayanan yang terlalu birokratis, rendahnya akuntabilitas, kurang responsif dan akomodatif terhadap tuntutan dan dinamika masyarakat. Sehubungan dengan itu dalam rangka mendiskusikan berbagai masalah di sekitar reformasi birokrasi, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV (PKP2A IV) LAN melaksanakan Seminar Nasional dengan tema *Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memetakan problematik reformasi birokrasi dalam rangka menciptakan tata-kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Mendiskusikan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
3. Mendiskusikan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dari perspektif moral.

C. Pembicara

1. Pemaparan substansi materi dan tanya jawab. Pemaparan substansi disampaikan oleh tiga narasumber yaitu:
 - a. Prof. DR. Agus Dwiyanto, MPA (Kepala LAN-RI) dengan topik "Evaluasi Kritis Reformasi Birokrasi Di Indonesia"
 - b. Prof. DR. Said Zainal Abidin, MPIA (Penasehat KPK) dengan topik "Korupsi Menciderai Reformasi Birokrasi"
 - c. Prof. DR. Syahrizal (Guru Besar IAIN Ar-Raniry) dengan topik "Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi dari Perspektif Islam".

D. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan, penyelenggaraan dan evaluasi dan pelaporan hal ini dilakukan agar tujuan dan sasaran kegiatan dapat tercapai dengan efektif. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan (Agustus - Oktober)
 - a. Pembahasan draft ToR (tema, jadwal, narasumber, peserta)
 - b. Koordinasi dengan narasumber dan pakar (terkait substansi materi seminar dan narasumber)
 - c. Finalisasi ToR
2. Tahap Penyelenggaraan (Nopember)
3. Tahap Evaluasi dan Pelaporan (Nopember-Desember)
 - a. Evaluasi teknis pelaksanaan dan substansi.
 - b. Penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.
 - c. Penyusunan *Proceeding*.

Sedangkan pelaksanaan Seminar dengan tema "*Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*" dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 1 Nopember 2012

Waktu : 08.00 - 14.00 WIB

Tempat : Hotel Hermes Palace Banda Aceh,

Jl. T. Panglima Nyak Makam, Banda Aceh.

BAB II

LAPORAN SEMINAR

A. Kata Sambutan

LAPORAN PENYELENGGARAAN SEMINAR
REFORMASI BIROKRASI MENUJU TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK
BANDA ACEH, 01 NOPEMBER 2012

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil alamin, washalatu wa salamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa shabihi ajmain.

Yang kami hormati (disesuaikan) ;

- Bapak Gubernur Aceh
- Kepala Lembaga Administrasi Negara Prof. DR. Agus Dwiyanto
- Penasehat KPK Prof. DR. Zainal Abidin, MPIA
- Para Bupati/Walikota Atau Yang Mewakili
- Rektor Unsyiah, Rektor IAIN Ar-Raniry, Rektor Unimal, Rektor Unida
- Para Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal
- Para Pejabat Lingkup Lembaga Administrasi Negara
- Hadirin dan hadirat sekalian.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Bapak/Ibu dan Hadirin yang terhormat.

Kami atas nama penyelenggara mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Seminar baik yang dari pusat, dari provinsi maupun dari kabupaten/kota. Semoga kehadiran Bapak/Ibu dapat memberikan kontribusi dalam Seminar hari ini yang mengambil tema "*Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*".

Bapak/Ibu dan Hadirin yang terhormat.

Sejalan dengan semangat reformasi yang mengamanatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, setiap instansi pemerintah dituntut mampu menciptakan aparatur yang bersih dari segala bentuk penyimpangan/pelanggaran baik yang terjadi pada aparatur pemerintah pusat/daerah. Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain disebabkan oleh lemahnya penerapan fungsi manajemen secara konsisten dan bertanggungjawab, rendahnya disiplin dan kinerja sumber daya manusia aparatur, lemahnya fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah, sistem karir berdasarkan prestasi kerja belum sepenuhnya diterapkan, gaji yang belum memadai untuk hidup layak, dan lemahnya sistem pertanggungjawaban publik yang kemudian berakibat rendahnya kualitas pembangunan. Untuk dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan tersebut, diperlukan suatu pola penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur hubungan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Secara empirik kinerja birokrasi menunjukkan kecenderungan yang belum efektif dan efisien, hal ini dapat dilihat dengan masih rendahnya kualitas pelayanan publik, pelayanan yang terlalu birokratis, rendahnya akuntabilitas, kurang responsif dan akomodatif terhadap tuntutan dan dinamika masyarakat. Sehubungan dengan itu dalam rangka mendiskusikan berbagai masalah di sekitar reformasi birokrasi, maka Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV (PKP2A IV) LAN melaksanakan Seminar Nasional dengan tema Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Bapak/Ibu dan Hadirin yang terhormat.

Dapat kami laporkan bahwa peserta seminar berjumlah lebih kurang 50 orang terdiri dari unsur Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Unsur Instansi vertikal di Provinsi Aceh, unsur Lembaga Administrasi Negara, unsur Perguruan Tinggi dan unsur LSM.

Adapun para narasumber yang akan menyampaikan makalahnya adalah:

1. Prof. DR. Agus Dwiyanto, MPA (Kepala LAN-RI)
Evaluasi Kritis Reformasi Birokrasi Di Indonesia
2. Prof. DR. Said Zainal Abidin, MPIA (Penasehat KPK)
Korupsi Menciderai Reformasi Birokrasi

3. Prof. DR. Syahrizal (Guru Besar IAIN Ar-Raniry)

Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi dari Perspektif Islam

Panel diskusi seminar ini nantinya akan dipandu oleh Bapak Mawardi Ismail, SH, M.Hum

Bapak/Ibu dan Hadirin yang terhormat.

Sebelum kami mengahiri laporan ini iijinkan kami memperkenalkan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A IV) LAN yang telah diresmikan oleh Bapak Menpan pada tanggal 12 Januari 2010. PKP2A IV LAN memiliki lingkup tugas terutama adalah wilayah Sumatera. PKP2A IV LAN-Aceh merupakan PKP2A yang keempat dibentuk oleh LAN. Sebelumnya telah dibentuk PKP2A I berkedudukan di Bandung. PKP2A II berkedudukan di Makassar dan PKP2A III berkedudukan di Samarinda.

Adapun tugas PKP2A adalah menyelenggarakan kajian/penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara dan pendidikan dan pelatihan aparatur Negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Bapak/Ibu dan Hadirin yang terhormat.

Akhirnya kami selaku penyelenggara mengucapkan terimakasih atas partisipasi dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara menghadiri undangan kami dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini.

Demikianlah laporan kami, dan mohon kepada Bapak Kepala LAN dapat menyampaikan sambutannya dan kepada Bapak Gubernur untuk dapat menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara Seminar.

Wabillahi taufiq walhidayah

Wassalammualaikumwarahmatullahi wabarakatuh

Kepala PKP2A IV

Drs. H. Dermawan, MM
NIP. 19590126 198303 1 005



SAMBUTAN KEPALA LAN
PADA
SEMINAR REFORMASI BIROKRASI MENUJU
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
BANDA ACEH 01 NOPEMBER 2012

"Bismillahirrahmanirrahim"

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang kami hormati (d disesuaikan) ;

- Bapak Gubernur
- Penasehat KPK Prof. DR. Zainal Abidin, MPIA
- Para Bupati/Walikota atau Yang Mewakili
- Rektor Unsyiah, Rektor IAIN Ar-Raniry, Rektor Unimal, Rektor Unida
- Para Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal
- Para Pejabat Lingkup Lembaga Administrasi Negara
- HadiriN dan Hadirat sekalian.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatNya kepada kita semua. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad saw.

Hadirin dan hadirat yang saya hormati.

Sistem politik Orde Baru telah berakhir sekitar satu dekade yang lalu dan reformasi birokrasi di Indonesia pun bergulir. Berbagai langkah reformasi di bidang birokrasi telah dijalankan di setiap periode pemerintahan. Mulai Presiden Habibie berusaha menata undang-undang kepegawaian dan organisasi birokrasi pemerintahan, kemudian dilanjutkan oleh Pemerintahan Abdurrahman Wahid yang merestrukturisasi dan melembagakan seperangkat etika di dalam institusi birokrasi. Pada masa Presiden Megawati lebih mengarahkan para menteriNya untuk mengendalikan birokrasi dengan ketat. Namun demikian, perkembangan reformasi birokrasi tersebut dini-

lai mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum. Oleh karena itu, pada tahun 2004 dimulailah program utama pemerintah untuk membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi.

Hadirin dan hadirat yang saya hormati.

Namun demikian, reformasi birokrasi di Indonesia tidak berjalan mulus. Hal ini terlihat dari catatan kualitas birokrasi di Indonesia oleh KPK menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik Indonesia pada tahun 2010 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni dari 6,5 menjadi 5,42 dari skala 10. Survey Doing Business yang dilakukan oleh International Finance Corporation – Bank Dunia pada tahun 2012 juga menyatakan bahwa Indonesia berada di posisi 129 dari 183 negara dalam kemudahan mendirikan usaha. Selanjutnya, berdasarkan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), pada tahun 2009 jumlah instansi pemerintah yang dinilai akuntabel baru mencapai 24%.

Jika reformasi birokrasi dipandang sebagai sebuah proses panjang untuk mewujudkan tata-kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara optimal, maka road map (peta jalan) dalam reformasi birokrasi seharusnya mampu mengidentifikasi setiap permasalahan atau kendala dan tantangan dalam mewujudkan birokrasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

Hadirin dan hadirat yang saya hormati.

Dalam perjalanannya, reformasi birokrasi dihadapkan pada berbagai persoalan diantaranya proses tumpang tindih (*overlapping*) antar fungsi-fungsi pemerintahan yang melibatkan jutaan pegawai dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, reformasi birokrasi membutuhkan sebuah terobosan baru yang mampu menata ulang sistem dan proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah. Atas dasar situasi tersebut, maka secara formal Pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi. Setahun kemudian, Pemerintah mengeluarkan peraturan lain un-

Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

tuk memastikan bahwa setiap kementerian/lembaga (K/L) telah melakukan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 mengenai pedoman penyusunan road map reformasi birokrasi K/ L dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Hadirin dan hadirat yang saya hormati.

Beberapa masalah dan tantangan dalam reformasi birokrasi di Indonesia antara lain: pertama, perbedaan pemahaman mengenai urgensi penataan birokrasi dan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Kedua, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM) serta masalah netralitas birokrasi dalam menjalankan manajemen pemerintahan. Ketiga, praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang cenderung meluas dan masif.

Tantangan dalam reformasi birokrasi bersumber pula dari adanya pertalian kepentingan antara korporasi dengan birokrat serta para wakil rakyat di parlemen. Tantangan ini terdapat di berbagai tingkatan. Pertalian kepentingan semacam ini menciptakan *bad corporate governance* yang berdampak pada marginalisasi kepentingan masyarakat, padahal tujuan akhir dari reformasi birokrasi adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hadirin dan hadirat yang saya hormati.

Dalam kaitan berbagai persoalan reformasi birokrasi kita yang masih menghadapi setumpuk persoalan, maka saya menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap upaya Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV LAN - Aceh melaksanakan seminar dengan tema Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Semoga dari seminar ini dapat disinergiskan berbagai pokok-pokok fikiran yang strategis bagi perbaikan jalannya Reformasi Birokrasi di Indonesia.

*Wabillahi taufik wal hidayah
Wassalamu alaikum wr. wb.*

Kepala LAN

Prof. DR. Agus Dwiyanto, MPA



SAMBUTAN GUBERNUR ACEH
PADA
SEMINAR REFORMASI BIROKRASI MENUJU
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
BANDA ACEH 01 NOPEMBER 2012

“Bismillahirrahmanirrahim”

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ‘ala rasulillah wa ‘ala alihi washahbihi wamawwalah.

Yang kami hormati (disesuaikan);

- Pimpinan dan anggota DPR Aceh,
- Para Bupati dan Walikota,
- Jajaran SKPA ,
- Para pejabat dari Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara, baik dari Jakarta, Bandung, Makassar, Samarinda serta Aceh sebagai tuan rumah,
- Para akademisi dan nara sumber,
- Hadirin dan hadirat yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti seminar nasional tentang reformasi birokrasi.

Shalawat dan salam, senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat Beliau sekalian.

Mengawali sambutan ini, saya ingin menyampaikan terimakasih dan ucapan “Selamat Datang” kepada para tamu kami dari luar Aceh, sekaligus saya juga menyampaikan penghargaan kepada PK-P2A IV-LAN Aceh yang telah bertindak sebagai tuan rumah dalam

pelaksanaan seminar ini. Semoga seminar ini mampu mendorong semangat kita untuk bekerja lebih baik lagi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) melalui reformasi birokrasi.

Hadirin yang saya hormati,

Upaya reformasi birokrasi yang telah berkumandang sejak beberapa tahun silam, sesungguhnya masih jauh dari kata selesai. Namun, semangat reformasi birokrasi itu masih berjalan di berbagai instansi dan lembaga di republik ini. Di beberapa instansi dan lembaga, ada kalanya semangat reformasi birokrasi ini berjalan dengan lancar dan mulus, tapi pada kesempatan lain, ada pula yang berjalan terseok-seok. Dengan kata lain, semangat ini harus terus menerus kita tingkatkan terutama dalam realita dan hasil kerja.

Begitu pentingnya semangat reformasi birokrasi ini, tidak heran jika program ini di tempatkan pada urutan pertama dari 11 prioritas pembangunan nasional. Dalam hal ini, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan itu, telah ditetapkan sembilan program percepatan reformasi birokrasi.

Hal yang sama juga telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh, sebagaimana dituangkan dalam Rancangan RPJM Aceh tahun 2012-2017, semangat reformasi birokrasi juga merupakan prioritas pertama yang ditempatkan pada nomor satu dari sembilan prioritas pembangunan yang dilaksanakan di daerah ini. Adapun sembilan prioritas pembangunan di Provinsi Aceh itu adalah:

1. Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan,
2. Pelaksanaan Dinul Islam, Sosial dan Budaya,
3. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian,
4. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran,
5. Peningkatan dan optimalisasi Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi,
6. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan,
7. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan,
8. Keberlanjutan Perdamaian, serta
9. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pengurangan Resiko Bencana.

Kami menempatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada urutan pertama, sebab kami percaya ini merupakan kunci dari keberhasilan program-program pemerintah lainnya. Tanpa adanya birokrasi yang baik, niscaya program-program lain tidak akan berjalan dengan baik pula.

Oleh sebab itu berbagai upaya perbaikan birokrasi terus kita lakukan termasuk melaksanakan berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi PNS. Upaya peningkatan kapasitas ini tidak hanya diberikan kepada staf, tapi akan berjenjang hingga ke pejabat eselon II. Kebijakan ini merupakan upaya untuk membangun birokrasi yang professional, terbuka untuk pegawai yang memenuhi syarat, sehingga birokrasi ini tidak lagi sebagai zona nyaman (*comfort zone*), tetapi menjadi zona kompetitif (*competitive zone*). Harus kita akui, memang hal ini tidaklah mudah, tapi demi perbaikan, tetap harus dilakukan.

Hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengatakan bahwa dalam merealisasikan program reformasi birokrasi tersebut, Pemerintah Aceh tidak berjalan sendirian. Peran aktif dari kalangan perguruan tinggi, NGO dan berbagai elemen masyarakat juga kami libatkan, karena merekalah inilah yang terus menerus memantau kinerja pemerintah Aceh. Itu sebabnya Pemerintah Aceh selalu berupaya membangun komunikasi dengan elemen-elemen tersebut untuk membangun kebersamaan demi perbaikan di jajaran birokrasi.

Sebagai contoh, dalam mengupayakan hadirnya sistem pelayanan publik berkualitas, Pemerintah Aceh menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga non pemerintahan guna mendorong agar pelayanan yang baik itu bisa terealisasi hingga ke tingkat desa. Sistem kontrol dan pengawasan pengelolaan anggaran juga terus menerus kita lakukan, termasuk penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Tapi, sekali lagi, semua itu tidak berjalan dengan mudah. Perlu kerjakeras untuk mendorong agar semangat tersebut berjalan secara berkesinambungan. Itulah sebabnya reformasi birokrasi masih jauh dari kata "Selesai." Karena itu, isu reformasi birokrasi masih tetap menarik untuk kita bahas dalam berbagai forum.

Untuk itu kami menyampaikan terimakasih kepada PKP2A IV-LAN Aceh yang kembali mengangkat tema reformasi birokrasi pada seminar yang kita selenggarakan hari ini. Mudah-mudahan berbagai

Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

isu terbaru tentang reformasi birokrasi, bisa kita kaji bersama sehingga langkah-langkah pembenahan birokrasi bisa kita laksanakan dengan lancar.

Hadirin yang berbahagia,

Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berharap mudah-mudahan seminar ini membawa manfaat bagi kita semua, sehingga dengan hadirnya birokrasi yang berkualitas, program-program yang dijalankan juga akan berkualitas. Selamat mengikuti seminar, semoga Allah SWT meridhai perjuangan kita menghadirkan birokrasi yang lebih baik.

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional dengan tema "*Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik,*" dengan ini resmi kami nyatakan dibuka.

Wabillahitaufiq walhidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Gubernur Aceh

dr. H. Zaini Abdullah

B. Makalah

“Evaluasi Kritis Reformasi Birokrasi Di Indonesia.”
oleh Prof. DR. Agus Dwiyanto, MPA
(Kepala LAN RI)

Kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia.

- Pemerintah memiliki kebijakan dan program RB yang jelas menggambarkan apa dan bagaimana melakukan perubahan. Grand Design Reformasi Birokrasi; 9 langkah percepatan, dsb. Pertama kali dalam sejarah pemerintahan di Indonesia
- RB menjadi prioritas pembangunan nasional.
- Pemerintah memberi tunjangan kinerja kepada K/L dan daerah yang terlibat dalam program RB. Tunjangan kinerja ini harus dijadikan insentif untuk melakukan perubahan.
- Dari sisi dukungan politik nasional, pelaksanaan kebijakan RB sudah cukup memadai.

Apakah kebijakan dan pelaksanaan RB sudah memadai?

- RB tidak terjadi dalam ruang yang vakum, tetapi dalam lingkungan dinamik. Kebijakan RB harus selalu diperkuat setiap waktu dan kesempatan.
- Perlu ada formative evaluation terhadap pelaksanaan RB, untuk mengetahui apakah implementasi sudah berjalan dengan baik, mana yang kurang dan perlu diperkuat, dsb.
- Apa yang perlu diperkuat: fokus dan arah perubahan; perlakuan terhadap kualitas kepemimpinan K/L dan daerah, peran dan keterlibatan warga dan kelompok masyarakat sipil, pembentukan budaya baru, dsb.

Konsolidasi arah perubahan dan outcome dari pelaksanaan RB:

- Setiap K/L/ dan daerah perlu menentukan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu, misal 5 tahun dari RB di instansinya. Harus ada roadmap dan milestone yang jelas.
- Outcome atau hasil yang akan dicapai oleh K/L dan daerah harus secara langsung memberi kontribusi pada sasaran dari program RB secara nasional. Insentif dan sumberdaya yang diberikan kepada K/L dan daerah disesuaikan dengan hasil yang ditawarkan.

- Area perubahan perlu dikonsolidasikan pada problema strategis dari masing-masing K/ L dan Daerah. Tidak perlu terlalu banyak dan terkotak-kotak. Bisa berbeda setiap K/L/Daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kegiatan RB bisa asimetrik.

Kepemimpinan: reform-mindseting kepemimpinan K/L dan Daerah

- Kepemimpinan tidak bisa diperlakukan secara *taken for granted*. Komitmen pimpinan K/L dan Daerah terhadap RB bervariasi. Perlu ada shared vision tentang RB pada tingkat pimpinan agar mereka dapat memimpin RB di instansi masing-masing. Pimpinan puncak dan birokrat akar rumput sangat strategik.
- Menjadikan capaian hasil/ outcome dari pelaksanaan RB di instansinya menjadi indikator keberhasilan pimpinan K/L dan Daerah.
- Penghargaan yang berarti perlu diberikan kepada K/L dan Daerah dan pimpinannya yang berhasil mewujudkan perubahan dan atau hasil yang ditargetkan.

Transformasi RB dari “*Government Program*” menjadi “*Social Movement*”

- RB masih didefinisikan sebagai “proyek pemerintah”, yaitu: program yang sarannya adalah internal birokrasi pemerintah, pelakunya pegawai pemerintah, manfaatnya masih terbatas pada internal birokrasi pemerintah, dan pengambil keputusannya umumnya pemerintah dan birokrasinya. Jika RB masih dipahami sebagai proyek pemerintah maka efektivitasnya terbatas.
- RB harus menjadi gerakan sosial dan “*project of the nation*”. Caranya?
 - o RB harus berorientasi pada terwujudnya hasil (*quick win* dan mendasar);
 - o Hasil yang dicapai terkait langsung atau tidak langsung dengan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat.
 - o Warga dan pemangku kepentingan menjadi pemanfaat dan pelaku dari proses perubahan
 - o *Social marketing* yang agresif dan tepat sasaran

Reformasi Birokrasi harus menjadi perubahan cultural

- Sebagian besar program RB di dunia gagal, hanya sekitar 30 persen yang berhasil
- Mengapa gagal, kualitas leadership, dukungan politik, dan tidak menjadi gerakan kultural.
- Perubahan dalam RB harus mencapai tingkat kultural. Perubahan struktur, prosedur, dan proses kerja dalam birokrasi harus diinternalisasikan menjadi mindset, tradisi, simbol, dan perilaku baru. RB harus menjadi gerakan kultural.
- Membuat struktur baru, proses dan tata laksana baru misalnya melalui e-government tidak banyak efek perubahannya kalau mampu mengubah pola pikir baru, tradisi, dan pola pikir baru.

RB harus mampu memperbaiki integritas dan standar etika birokrat

- RB memiliki peluang memperbaiki etika dan integritas.
- Ketika penghasilan dinaikan, maka peluang pemberantasan gratifikasi dan korupsi menjadi semakin besar.
- Perilaku integer dan standar etika yang tinggi harus mulai ditegakkan secara konsisten dan terus menerus
- Pimpinan harus memberi contoh dan berani bertindak untuk mendisiplinkan anggotanya
- Menginternalisasikan berbagai program yang ada, seperti zona integritas, wilayah bebas korupsi, tertib administrasi menjadi gerakan kultural.

Perubahan harus bersifat sistimik

- RB memerlukan dukungan peraturan perundangan yang mampu menciptakan lingkungan yang kondusif dan mempercepat perubahan kultural.
- Percepatan reformasi UU dan peraturan perlu segera dilakukan. RUU ASN, Administrasi Pemerintahan, UU pemerintahan daerah perlu segera dilakukan.
- UU harus memberi basis legal bagi praktik *governance* yang baik dan memberi arah perubahan yang jelas dan benar.
- Koherensi dalam peraturan perundangan dan konsistensi dalam pelaksanaan harus dijaga dengan baik.

“Korupsi Menciderai Reformasi Birokrasi”
Oleh Prof. DR. Said Zainal Abidin, MPIA.
(Penasehat KPK)

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang:

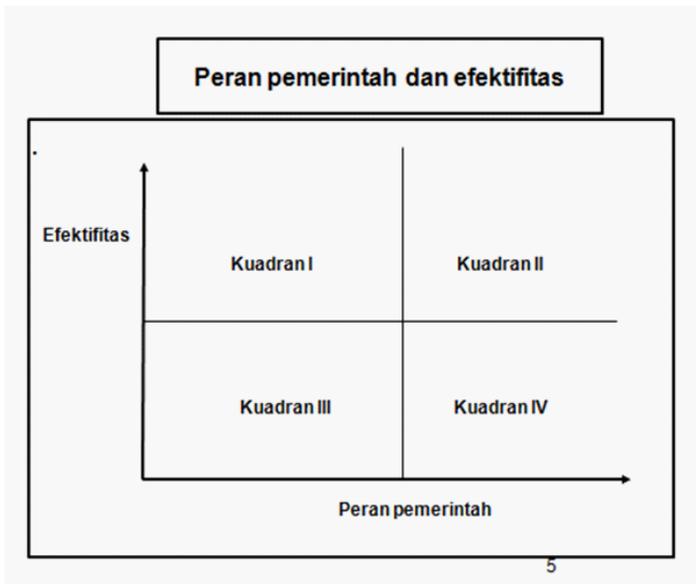
1. Bersih
2. Efektif
3. Dedikatif

Pemerintahan yang bersih:

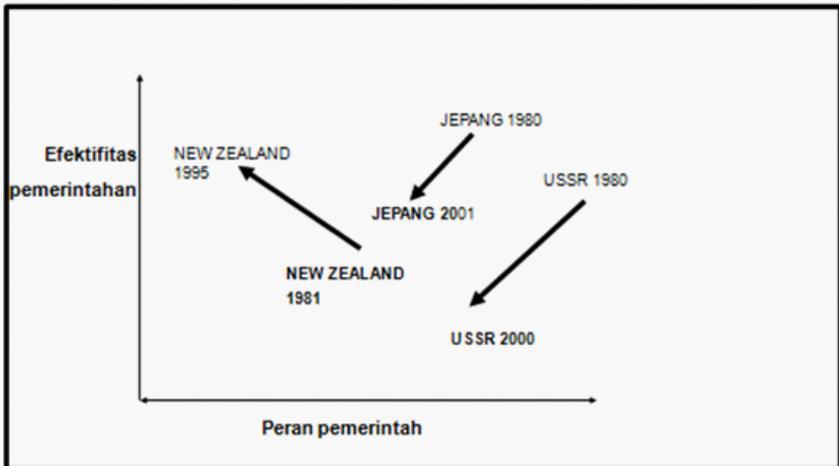
1. Bersih dari korupsi
2. Bersih dari kolusi
3. Bersih dari nepotisme

Pemerintahan Yang Efektif adalah:

Pemerintahan yang setiap kebijakan yang dibuatnya terlaksana di lapangan. Derajat suatu pemerintahan ditentukan oleh sejauh mana kebijakan yang dibuatnya mampu dilaksanakan di lapangan. Administrasi public adalah proses implementasi/pelaksanaan kebijakan. Pemerintahan yang efektif=pemerintahan yang administrasi publiknya baik.



PERUBAHAN PERAN DAN EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN



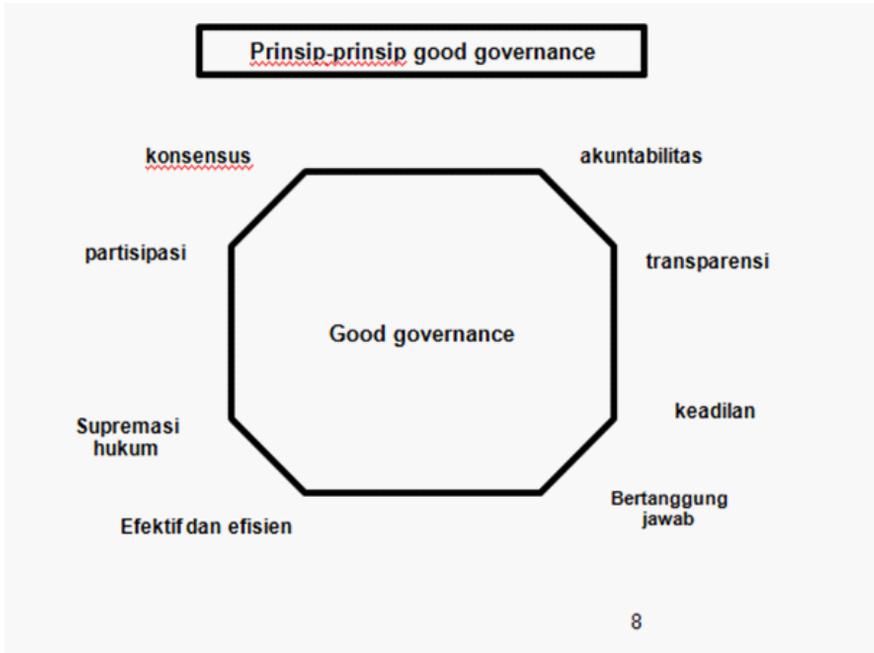
6

PEMERINTAHAN YANG DEDIKATIF

- PEMBANGUNAN UNTUK RAKYAT
- PEMBANGUNAN DENGAN PARTISIPASI AKTIF SELURUH MAYARAKAT

???

7



**APA DAN MENGAPA
DENGAN KORUPSI..??!!**

Korupsi dalam pandangan masa lampau.
dengan korupsi terjadi:

- konsentrasi modal
- meningkatkan tingkat efisiensi
- tetap dalam blok anti-komunis

korupsi dalam pandangan masa sekarang

- penyakit masyarakat
- mencelakakan kehidupan bermasyarakat dan perorangan

**30 Jenis Korupsi dalam
UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001**

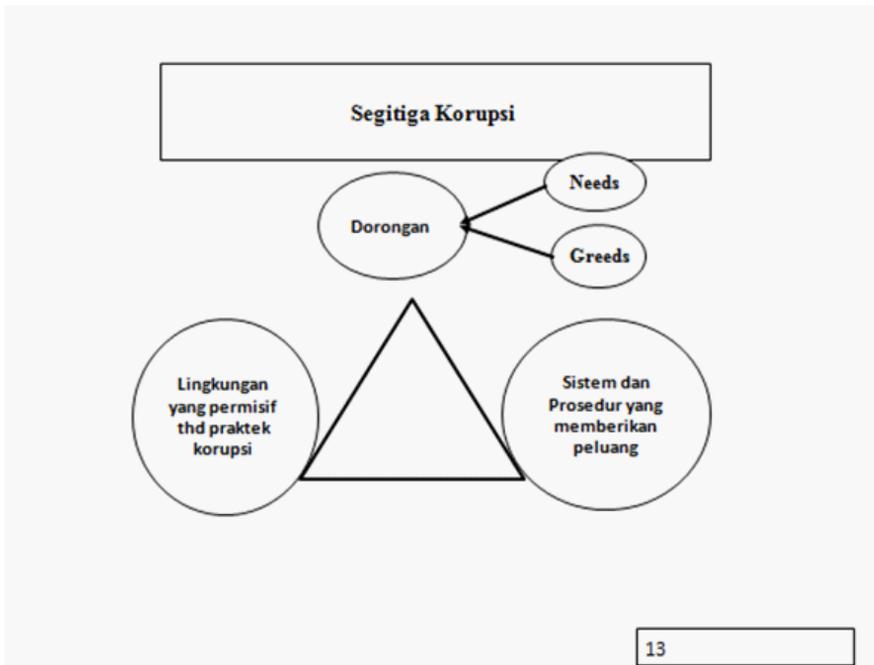
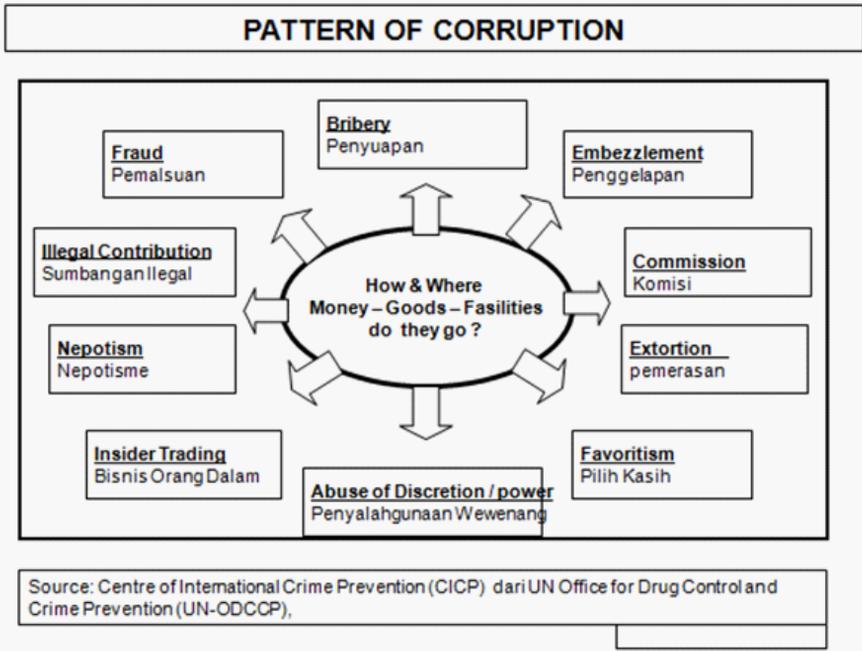
Dijabarkan dalam 13 pasal

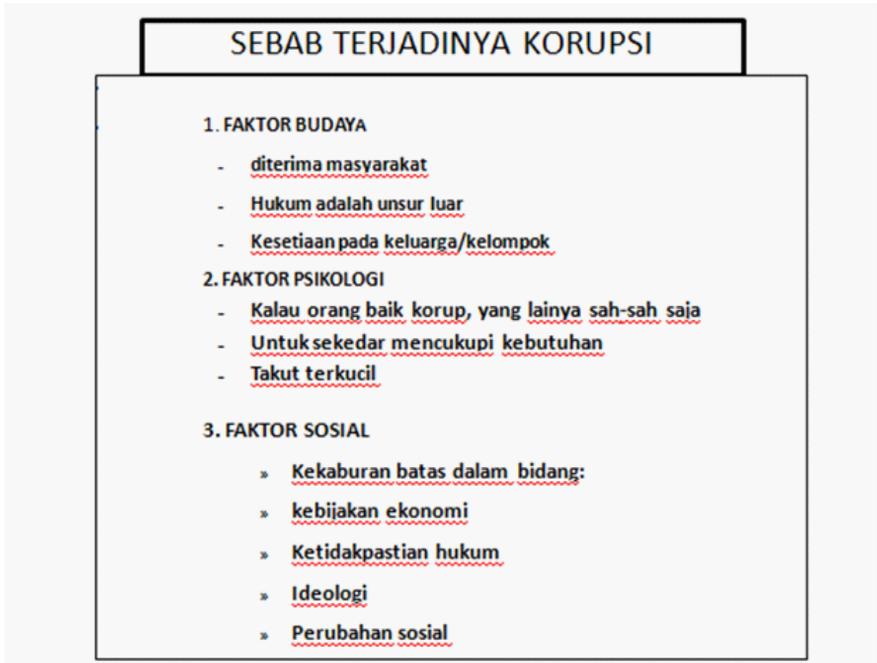


Dikelompokkan menjadi :

1. Merugikan keuangan negara;
2. Merugikan Perekonomian Negara
3. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi
4. Suap-menyuap;
5. Penggelapan dalam jabatan;
6. Pemerasan
7. Perbuatan curang
8. Benturan kepentingan dalam pengadaan
9. Gratifikasi

11





Sebab Lain Dari Korupsi:

1. Sistem Administrasi Yang lemah/ tidak efektif
2. Kompensasi yang tidak proporsional (tidak dapat menjamin orang jujur hidup layak)
3. Pejabat yang serakah
4. Pengawasan Yang tidak efektif
5. Law Enforcement yang tidak berjalan
6. Ringannya hukuman bagi koruptor:
 1. Tidak ada efek Jera
 2. Tidak ada efek takut
7. Tidak ada keteladanan yang baik
8. Budaya Yang toleran

Dampak Korupsi

- Rendahnya kualitas infrastruktur dan pelayanan publik;
- Timbulnya ekonomi biaya tinggi;
- Berkurangnya penerimaan negara;
- Runtuhnya lembaga dan nilai-nilai demokrasi;
- Membahayakan kelangsungan pembangunan dan supremasi

hukum;

- Meningkatnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat;
- Bertambahnya masalah sosial dan kriminal;
- Adanya mata rantai antara korupsi dengan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi.

Upaya perbaikan pelayanan publik

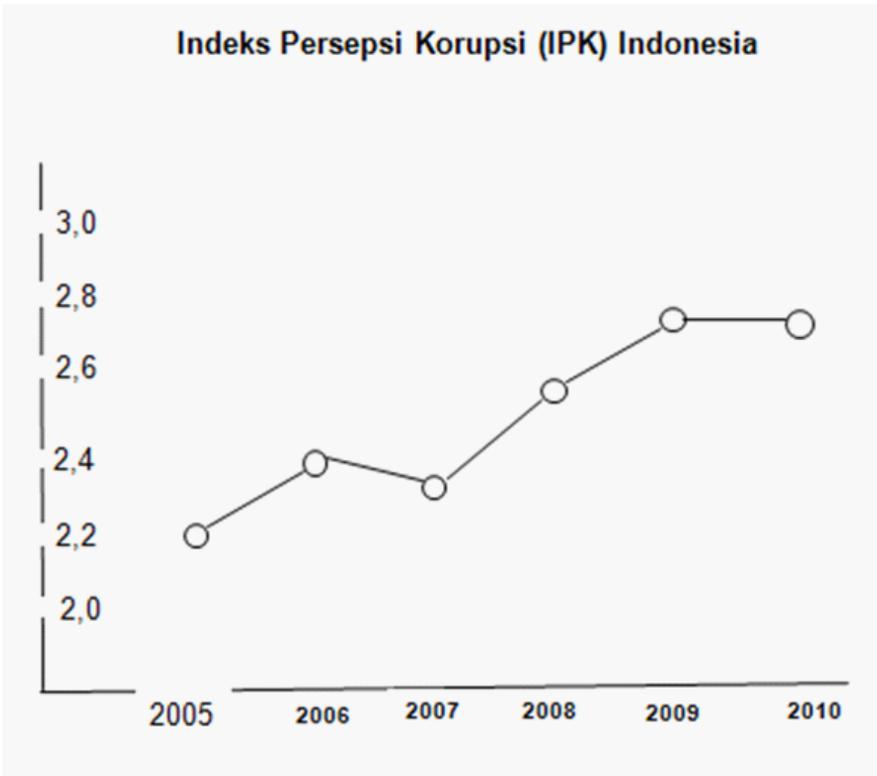
- Perbaikan prosedur
- Pengadaan pelayanan yang kompeten, berintegritas dan sejahtera
- Pengendalian yang handal
- Kemudahan akses
- Tersedia informasi yang murah dan mudah
- Adanya layanan komplain dan tindak lanjut
- Menimbulkan kepastian dalam layanan dan kepercayaan masyarakat
- Penindakan terhadap oknum yang menyimpang dan menciderai kepercayaan
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan

Perlu kesabaran dan kreatifitas

- Butuh kreatifitas .
 - Karena kita berada dalam era teknologi maju, dengan tetap dalam koridor peraturan.
 - Koruptor dan pembelanya bebas ber-akrobat
- Berhadapan dengan kekayaan
 - Tak ada koruptor orang miskin
- Berhadapan dengan kekuasaan dan kekayaan
 - *Power tend to corrupt, the more powerful the more tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely.*
 - Saling mendukung dan mencipta antar kekuasaan dan kekayaan.
- Sebagai konsekwensi, korupsi selalu didukung pembela lihai
- Waktu untuk memberantas korupsi selalu terbatas
 - Perlu waktu dan
 - Rakyat tidak sabar
 - muncul bergelombang

CORRUPTORS FIGHT BACK ?

- Memperlemah upaya pemberantasan korupsi
 - delegitimasi institusi pemberantasan korupsi (membunuh karakter penggiat anti korupsi;
 - menurunkan wibawa pemerintah;
 - mengadu domba antar institusi anti korupsi;
 - menghilangkan kepercayaan rakyat kepada institusi anti korupsi;
 - mengganggu ketenteraman publik ;
 - memberi perlawanan secara fisik (menciptakan *chaos*);
- Merubah sistem pemerintahan yang pro-korupsi



FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN IPK

1. Pengajuan Izin Usaha
2. Prosedur Pelayanan Publik
3. Pembayaran Pajak
4. Pemberian Kontrak Pemerintah
5. Mendapatkan Keputusan Hukum Yang Menguntungkan
6. Mempengaruhi pembentukan regulasi (kebijakan)
7. Mempercepat Proses Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi
dari Perspektif Islam
oleh Prof. DR. Syahrizal
(Guru Besar IAIN Ar-Raniry)

Realitas Objektif:

- Tata kelola pemerintahan belum berjalan sesuai semangat reformasi
- Kinerja birokrasi cenderung belum efektif dan efisien
- Kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas publik masih rendah.
- Fungsi manajemen belum berjalan secara konsisten dan bertanggung jawab.
- Fungsi pengawasan terhadap aparaturnya masih sangat lemah.
- Tata kelola pemerintahan dan birokrasi menjadi sarang penyimpangan, berupa KKN dan tindakan lain yang merugikan kepentingan publik.
- Penyimpangan jamak dilakukan oleh aparaturnya, cenderung aparaturnya yang berpendidikan tinggi dan sekaligus orang yang beragama.

Reformasi Birokrasi dalam Islam

- Tata kelola pemerintahan adalah *nidham siyasi* untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan kesejahteraan.
- Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan amanah bagi manusia yang mengemban tugas sebagai wakil Tuhan di bumi (*khalifatullah fil ardh*).
- Reformasi birokrasi adalah keniscayaan yang mesti dilakukan secara terus menerus sesuai dengan pesan al-Qur'an Surah ar-Ra'du ayat 11: "*Allah tidak akan merubah suatu kaum, kecuali kaum tersebut berusaha merubahnya*".
- Reformasi birokrasi dalam Islam dilakukan terhadap dua hal esensial :
 1. Reformasi kemanusiaan (*taghayyur insaniyyah*)
 2. Reformasi sistem (*taghayyur nidhamiyyah*)
- Aparaturnya atau orang yang mendapat kepercayaan publik adalah pengemban amanah yang berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada publik (*al-khidmah al-'ammah*), melala-

lui reformasi birokrasi. Rasul Saw menyatakan: *“Anda lebih tahu dalam urusan duniamu”*.

Korupsi Menurut Islam

- Birokrasi adalah lahan rentan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena pada birokrasi melekat kekuasaan.
- Korupsi adalah perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah atau swasta yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya (Pasal 1 dan 2 UU No. 31 Tahun 1999).
- Tindakan korupsi adalah tindakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat (publik). Landasan al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 58: *“Allah menyuruhmu untuk menunaikan amanah kepada ahlinya”*. Rasul SAW bersabda: *“amanah akan dimintai pertanggungjawaban tidak hanya di dunia tetapi juga di hari akhir”*.
- Tindakan korupsi adalah tindakan memakan harta orang lain secara melawan hukum (batil). Landasan al-Qur'an surah an-Nisa 29: *“Janganlah kamu memakan harta di antara kamu secara batil”*
- Aparatur negara atau penerima amanah adalah pelayan (*khadim*) bagi rakyat yang mengurus seluruh kepentingan mereka yang memberikan amanah.
- Tindakan korupsi termasuk dalam kategori pengkhianatan amanah (*ghulul*). Rasul SAW bersabda; *Berikanlah hak-hak rakyat, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung jawaban setiap penguasa perihal hak-hak rakyat* (HR Bukhari).
- Korupsi termasuk di dalamnya risywah (suap), sebagaimana Rasul SAW juga bersabda: *Allah memberikan laknat kepada pemberi suap, penerima suap dan perantara suap* (HR. Al-Hakim)

Penyebab Utama Korupsi

- Lemahnya sistem dalam tata kelola pemerintahan; pengawasan, gaji, jenjang karir, aparatur tidak profesional, lingkungan dan lain -lain.
- Islam melihat penyebab utama lahirnya korupsi adalah persoalan manusia sebagai penguasa amanah publik. Melemahnya

karakter, rasa malu, hilangnya moral, dan hanya memaknai agama sebagai bagian luar (eksetoris) dan rutinitas ibadah, serta tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar.

- Berkembangnya sikap hidup hedonistik, dan materialistik bukan hanya di kalangan pemegang kekuasaan publik, tetapi juga masyarakat.

Pemberantasan Korupsi

- Pemberantasan korupsi semestinya dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan komprehensif terhadap sistem dan tata kelola pemerintahan secara berkesinambungan (*at-tadarruj fil-islam*).
- Penumbuhan kesadaran kepada pemegang amanah (pemegang kekuasaan atau birokrat), bahwa amanah akan dimintai pertanggung jawaban di hari akhir, memakan harta orang lain secara *bathil* adalah dilarang (*dhalim*), dan pengawasan Allah jauh lebih akurat dari pengawasan manusia.
- Pelaku korupsi mendapat laknat dari Allah dan hukuman di hari akhir, dan dapat dihukum ta'zir oleh pemerintah/pengusaha selama berada di dunia.

PENUTUP

Mewujudkan keamalahatan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat adalah amanah dan tanggung jawab mulia. Cita-cita ini bisa diwujudkan melalui sistem yang baik dan pemangku amanah yang baik pula. (al-Hikmah)

C. Makalah Pendamping

Penguatan Etika Dan Integritas Birokrasi
Dalam Rangka Pencegahan Korupsi
Oleh Husni Bahri TOB (Widyaiswara Utama LAN RI)

A. Mengapa ETIKA & INTEGRITAS ?

Etika didefinisikan sebagai suatu ilmu yang berhubungan dengan baik dan buruk dan dengan tugas dan kewajiban moral. (Wehrich & Koontz, 2005)

Kamus Besar Bahasa Indonesia

- Etik:
 - a. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
 - b. Nilai mengenai benar dan salah, yang dianut golongan atau masyarakat.
- Etika:
 - a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk.
 - b. Hak dan kewajiban moral.

The Liang Gie

1. Etika merupakan nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia.
2. Moral adalah karakter dan sifat-sifat individu yang khusus dari luar ketaatan pada peraturan.
3. Etika berkenaan dengan moralitas yang mengandung pertimbangan-pertimbangan yang jauh lebih tinggi tentang kebenaran dan keharusan yang mempunyai sanksi-sanksi hukum.

Kattsoff

“Etika berkenaan dengan sistem dari prinsip-prinsip moral tentang baik dan buruk dari tindakan atau perilaku manusia dalam kehidupan sosial”.

Paul R. Leonard Governor of Ohio

“Etika adalah hal yang utama. Tanpa Etika, tidak akan ada penghargaan terhadap pejabat yang terpilih. Tanpa penghargaan, tidak ada kredibilitas. Tanpa kredibilitas seseorang tidak akan bisa memimpin dengan baik.”

What is Morality ? (Collins Cobuild, 1990)

- Moralitas : merujuk ke situasi dimana suatu perilaku dianggap benar, tepat dan dapat diterima.
- Moralitas : adalah suatu sistem dasar dan nilai yang berkaitan dengan perilaku manusia, yang biasanya diterima oleh masyarakat atau sekelompok orang tertentu.

Konsep Integritas

Menurut KBBI, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, dan kejujuran. Sedangkan konsistensi antara tindakan dan nilai. Orang yang memiliki integritas, hidupnya sejalan dengan nilai-nilai prinsipnya. Kesesuaian antara kata-kata dan perbuatan merupakan hal yang esensial.

Menurut Collins Cobuild Dictionary, "Integritas adalah kualitas kejujuran dan keteguhan dalam prinsip-prinsip moral"

Integritas vs Kejujuran

➤ Integritas :

Menceritakan kebenaran
pada diri sendiri.

➤ Kejujuran :

Menceritakan kebenaran
pada orang lain.

Integritas dalam Etika

Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran yang merupakan kata kerja atau akurasi dari tindakan seseorang. Integritas dapat dianggap sebagai kebalikan dari kemunafikan. Dalam konteks akuntabilitas, integritas berfungsi sebagai ukuran kesediaan menyesuaikan sistem nilai untuk memelihara atau meningkatkan konsistensi. Integritas dianggap sebagai kebajikan dimana akuntabilitas dan tanggung jawab moral dipergunakan sebagai alat yang diperlukan untuk mempertahankan konsistensi tersebut.

B. Birokrasi

Apa yang dimaksud dengan Birokrasi? "Birokrasi merupakan sistem administrasi, utamanya dalam pemerintahan, yang membagi pekerjaan ke dalam kategori tertentu, untuk dilaksanakan oleh pejabat karir di unit kerja yang bersangkutan."

Konsep Pokok Dalam Birokrasi (Weber)

1. Pembagian pekerjaan administrasi yang baik diantara personel dan unit kerjanya.
2. Sistem kepegawaian dengan pola rekrutmen baku dan jalur karir yang jelas.
3. Hirarki antar unit kerja, dimana kewenangan dan status diatur sesuai dengan tugas individunya.
4. Jejaring resmi dan tidak resmi antar pegawai melalui jalur informasi dan pola kerja sama.

Blau dan Meyer

Birokrasi adalah jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administrasi dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis.

Bintoro Tjokroamidjojo

- Birokrasi merupakan struktur sosial yang terorganisir secara rasional dan formal. Jabatan-jabatan dalam organisasi diintegrasikan ke dalam keseluruhan struktur birokrasi.
- Birokrasi disusun sebagai hirarki otoritas yang terelaborasi yang mengutamakan pembagian kerja secara terperinci yang dilakukan sistem administrasi, khususnya oleh aparatur pemerintahan.

Mengapa perlu Birokrasi ?

1. Birokrasi merupakan alat utama untuk mencapai organisasi yang efisien dan rasional. (Weber, 1922).
2. Birokrasi adalah mesin sebuah negara dalam pelaksanaan semua kebijakan dan keputusan politik.

PP Nomor 42 Tahun 2004 : Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

- o Etika dalam bernegara;(Psl.8);
- o Etika dalam berorganisasi;(Psl.9);
- o Etika dalam bermasyarakat;(Psl.10);
- o Etika terhadap diri sendiri,(Psl.11);
- o Etika terhadap sesama PNS.(Psl.12);

Jadi yang dimaksud dengan etika & integritas birokrasi adalah penggunaan standar/norma/moralitas yang berlaku (etika publik) yang secara konsisten diwujudkan dalam tindakan faktual birokrasi (dalam pelaksanaan mekanisme) untuk pencegahan korupsi di Indonesia.

Relevansinya terhadap Kepemimpinan?

The Value of Leadership

- Kepemimpinan adalah suatu proses moralitas dimana pemimpin berinteraksi dengan bawahannya berdasarkan keinginan dan nilai serta tujuan bersama (Burn, 2010)
- Kualitas utama seorang pemimpin adalah integritas (Dwight D. Eisenhower)

Ten commandements of Executive Integrity (Steven Kerr)

1. Berkata benar;
2. Taat hukum;
3. Meminimalisir kebingungan;
4. Peduli;
5. Bertanggungjawab atas pembinaan bawahan;
6. Bersikap demokratis, tidak otoriter;
7. Menciptakan suasana terbebas dari pengaruh melakukan korupsi;
8. Selalu bertindak;
9. Selalu konsisten dalam segala hal;

10. Selalu konsisten antara nilai yang dijunjung dengan tindakan yang dilakukan.

C. Pencegahan Korupsi Kondisi Indonesia

- 1) Presiden SBY (13 Februari 2012) mengeluhkan “pemberantasan korupsi sangat sulit, berat, butuh waktu dan kerja sama semua pihak”.
- 2) Sejak 1999 telah diberlakukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun hasilnya belum optimal.
- 3) Banyak kasus korupsi di Indonesia terkait dengan penyalahgunaan wewenang.
- 4) Korupsi sudah meluas terjadi pada Lembaga penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) bahkan di BUMN.

Apa itu Korupsi ?

Susan Rose – Ackerman: “Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.”

Henry Campbell Black: “Suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud memberi keuntungan tertentu sebagai imbalan atas tugas yang bukan wewenangnya di satu sisi dan mengambil hak orang lain di sisi lain.”

Brooks: “Dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.”

Kartini Kartono: “Tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna merengguk kepentingan pribadi, merugikan kepentingan umum dan Negara.”

BPKP: “Tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.”

Sebab terjadinya korupsi “apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi.” (S.H. Alatas).

Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat (1) : “Perbuatan korup diartikan sebagai tindakan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Hal ini sejalan dengan pemikiran Lord Acton bahwa “kekuasaan cenderung membuat orang korupsi” dan “kekuasaan yang absolute pasti korupsi”

Sedangkan Pasal 3 menjelaskan bahwa “Perbuatan ‘korup’ dilakukan oleh setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.”

Nugroho (2007) menyatakan bahwa akar masalah korupsi di negara berkembang sebagai berikut:

- Kemiskinan
- Kekuasaan yang berlebihan
- Budaya
- Ketidaktahuan
- Rendahnya kualitas moral dan integritas

Kasus Korupsi di Indonesia

- Kasus BLBI
- Kasus Century
- Kasus Penyalahgunaan APBN dan APBD
- Kasus Pengadaan Barang dan Jasa
- Januari - Agustus 2011 terdapat 1.081 Kasus Korupsi masuk tahap penyidikan
- Dst...

Mengapa Fokus Pencegahan?

Strategi total penindakan, seperti yang dulu dijalankan oleh badan-badan anti korupsi, terbukti tidak efektif dalam mengatasi problem korupsi yang sudah sistemik di Indonesia.

Yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia:

- Sejak 2006 Penayangan foto dan data Koruptor melalui media elektronik dan cetak;

- Memperkuat wewenang KPK dalam gerakan Pemberantasan Korupsi;
- Hukuman Berat bagi Koruptor;
- Sanksi sosial.

Strategi Pemberantasan Korupsi

1. Bidang Pencegahan (*Preventive*) :
 - a. Pembentukan integritas bangsa
 - b. Penerapan *Good Governance*
 - c. Reformasi Birokrasi
2. Bidang Penindakan (*Kurative*) :
 - a. Penyelidikan
 - b. Penyidikan
 - c. Penuntutan
3. *Institution Building*
4. Penggalangan Partisipasi Masyarakat

Program Kunci SBY-Boediono 2012

1. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
2. Program percepatan pembangunan 2012;
3. Open government atau transparansi di pemerintahan;

D. Kesimpulan

Langkah nyata yang perlu dilakukan :

- Memperbaiki sistem sehingga tidak memberikan peluang terjadinya korupsi;
- Membangun aparat pengawasan yang handal sehingga peluang yang ada tidak bisa dimanfaatkan oleh koruptor;
- Membangun budaya taat hukum sehingga mampu mengerem niat jahat untuk melakukan korupsi. (aktualisasikan peran pendidikan);
- Membangun kualitas sdm yang memiliki integritas moral dan kualitas kompetensi yang tinggi;
- Kembangkan pola single salary dalam remunerasi pegawai dan pejabat negara;
- Menjaga, mengatur, mengawasi kerawanan korupsi agar tidak dimanfaatkan oleh koruptor;
- Mencegah bertemunya niat, kemampuan berbuat, peluang dan sasaran yang cocok untuk dikorupsi agar tidak terjadi korupsi;

PESAN

- Jadilah pejabat yang memiliki integritas moral dan kompetensi yang handal dibidang yang anda geluti saat ini;
- Masyarakat menunggu hadirnya pimpinan yang memiliki semangat pembaharuan untuk kejayaan bangsa ini dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab di dunia;
- Jangan sia-siakan harapan keluarga, masyarakat dan bangsa untuk bangkit melawan korupsi yang saat ini sedang merajalela di segenap aspek kehidupan kita;
- *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah 2 : 188);*
- *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa 4:29);*
- *Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan anianya, maka Kami akan memasukkannya ke dalam neraka, Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah (QS. An-Nisa 4:30);*
- *Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati. (QS. Al-Fatir : 35-38);*

D. TANYA JAWAB.

1. Fauzi (WI BPKPP Aceh);
 - Bagaimana Strategi LAN dalam meningkatkan RB supaya berhasil ?
2. Yatiman (Kanwil Kemenkumham Aceh)
 - Menpan sudah membuat Grand Design RB
 - Terkait dengan LAN: hasil-hasil didikan terbaik dari Diklat, Lemhanas, dan diklat teknis lainnya tidak ada jaminan terpakai,
 - Sejauhmana peran LAN dalam merubah pola *mindset* aparatur dalam RB?
 - Korupsi tdk hanya mencederai tapi juga menghancurkan
 - Koordinasi tupoksi KPK dgn instansi belum optimal.

- Perlu sosialisasi budaya anti korupsi ke sekolah-sekolah dan tempat umum, sosialisasi melalui lembaga adat Aceh ke kampung2.
3. Jasman M. Aruf (Disdukpar)
- Pelayanan publik Indonesia salah satu yang terjelek di dunia
 - Korupsi meningkat karena kapasitas SDM, dalam hal ini perekrutan PNS. yang belum sepenuhnya terbebas dari KKN ?
 - pola karier PNS tidak berjalan baik. terkadang guru tapi bisa menjadi pimpinan di instansi yang bukan kompetensi ke-ilmuannya.
4. Husni Bahri Tob (WI Utama LAN- Mantan Sekda Aceh)
- Ke Prof. Syahrizal; Bagaimana RB kelembagaan dalam perspektif Islam ?
 - Ke Prof. Said Zainal; Dalam RB, terkait dengan besar dan kecilnya peran pemerintah. Kira-kira Indonesia cocok memakai kuadran yg mana ?
 - Ke Prof. Agus ;RB terkait dengan Move sosial dan perubahan mindset move sosial RB, harus dilakukan serentak di Kementerian/Lembaga dan Daerah. Selama ini, RB yng berujung remunerasi hanya memanjakan Kementerian/Lembaga yang sudah mapan (ex; Kementerian Keuangan)
5. Dr. Taqwaddin (Ka. Ombudsman Aceh)
- 5 indikator RB di daerah: Penyelesaian kasus Korupsi, Pelaporan Keuangan menurun, Pelayanan satu atap,
 - Ke Ka. LAN: supaya memperhatikan peningkatan kapasitas Aparatur di Daerah.
 - Perlu ada penguatan terhadap lembaga-lembaga pengawan publik dalam ombudsman, melalui kemitraan dengan LAN.

Tanggapan/Respon:

Kepala LAN RI;

- Lulusan Diklat PIM dan Lemhanas yang tidak terpakai tenagaanya, tidak terlepas dari kaulitas dan pemahaman, kepatuhan dalam menjalankan prosedur yang telah ditentukan.

- LAN akan memperbaharui kriteria perekrutan calon peserta Diklat PIM (Kepemimpinan).
- RB harus mendorong perbaikan budaya kerja aparatur.
- Ke Jasman; Polisasi karier dan Migrasi Karier memang terjadi, boleh saja guru beralih jadi pejabat, tapi haruslah sesuai dan kompetensi dan kompetitif.

Prof. DR. Said Zainal (penasehat KPK):

- ke Yatiman; terkait dengan Koordinasi dengan instansi lain dalam pemberantasan korupsi, KPK dengan Lembaga Lain sangat baik, namun ya ada sedikit senggolan karena oknum-oknum tertentu.
- Ke Yusri; konsep amanah itu adanya di konsep pemerintah yang bertanggung jawab.
- Ke Husni Bahri Tob; Indonesia berada antara pada kuadran III dan IV, yaitu campur tangan pemerintah besar.
- Sistem Penggajian penyelenggara di Indonesia relatif kecil, sehingga belum bisa menjamin orang jujur hidup layak.
- KPK sedang mempelajari/penjajakan dengan Pemda Aceh, untuk bekerjasama pemberantasan korupsi.
- Laporan Kekayaan dan Keuangan masih diragukan validitas dan kebenarannya.
- Pemberantasan Korupsi tidak hanya menjadi tugas KPK, tapi tugas semua warga negara.

Prof. Syahrizal (Guru Besar IAIN Ar-Ranirry):

- Tujuan esensi RB dalam konteks islam adalah merubah aspek kemanusiaan. Untuk merubahnya perlu desain pendidikan. Oleh karena itu RB akan berhasil apabila desain pendidikan juga berubah. Kecendrungan kita menempatkan pendidikan hanya bersifat formal (diselenggarakan oleh pendidikan formal).
- esensi tujuan RB dalam aspek sistem maksudnya, merubah birokrasi tidak bisa dilakukan oleh satu dua lulusan anak bangsa yang terbaik, tapi haruslah bersama-sama.

BAB III

PENUTUP

Reformasi Birokrasi menjadi isu yang strategis dan masih aktual dalam menciptakan good governance. Pemerintah sudah memiliki kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi, ada 9 langkah prioritas program. Keinginan kuat pemerintah untuk mendorong perubahan pada birokrasi. Apakah kebijakan Reformasi Birokrasi sudah memadai? jawabannya belum, masih ada banyak kendala. Reformasi Birokrasi tidak berlangsung dalam ruang yang vakum dalam satu lingkup saja, tapi adalah milik bersama.

Sudah saatnya transformasi Reformasi Birokrasi dari proyek pemerintah menjadi pergerakan sosial. Hal ini, karena perbaikan pemerintah, menjadi urusan semua warga negara, bukan hanya pemerintah dan DPR saja. Reformasi Birokrasi tidak hanya perubahan struktur, cara kerja, tapi juga budaya kerja dan pola pikir pegawai. Perubahan culture tersebut harus diinternalisasikan ke pegawai-pegawai.

Reformasi Birokrasi gagal karena; kualitas leadership, dukungan politik, dan tidak menjadi gerakan kultural. E-Government terkesan masih seperti aksesoris, karena disaat kita masuk ke kantor-kantor masih banyak tumpukan berkas-berkas. Kemudian belum berhasil merubah pola perilaku pegawai. Reformasi Birokrasi memiliki peluang untuk memperbaiki integritas dan standar etika birokrat.

Reformasi Birokrasi dan Pemerintah Yang bebas KKN, sangat terkait. Tujuan sama-sama mengelola pemerintahan yang baik. Di beberapa negara maju, persentase SDM aparturnya lebih banyak pada tenaga lapangan (fungsional), dibandingkan Pejabat. Pembangunan yang dedikatif (pembangunan untuk rakyat, partisipasi aktif masyarakat), yaitu pembangunan yang tidak hanya mengejar penambahan pendapatan perkapita rakyatnya, tapi adalah bagaimana menciptakan inovasi masyarakat dalam pembangunan yang dikenal dengan *imporove man inovation*. Prinsip-prinsip *Good Governance*; partisipasi, konsensus, akuntabilitas, transparansi, keadilan, bertanggung jawab, efektif dan efisien supremasi hukum. Reformasi

Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Birokrasi akan melahirkan pemerintahan yang baik dan efektif. Reformasi Birokrasi dianggap berhasil jika dapat mengurangi bahkan menghilangkan korupsi.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Suasana Ramah Tamah



Laporan Panitia Pelaksana oleh Kapus PKP2A IV



Sambutan Kepala LAN Prof. DR. Agus Dwiyanto, MPA



Pembukaan seminar oleh Gubernur Aceh diwakili oleh Asisten III



Pembacaan Doa



Suasana Seminar



Suasana Seminar



Suasana Seminar



Tanggapan Peserta



Tanggapan Peserta



Antusiasme peserta terlihat dari gencarnya tanggapan dan pertanyaan peserta seminar



Narasumber



Penyerahan Piagam Penghargaan kepada Narasumber

BIOGRAFI NARASUMBER

Prof. DR. Agus Dwiyanto,MPA

Prof. DR. Agus Dwiyanto, MPA adalah Kepala LAN-RI yang baru dilantik pada tanggal 21 Juni 2012. Agus panggilan akrabnya adalah pria kelahiran Yogyakarta, 2 Mei 1955. Ia menyelesaikan pendidikan doktor dan master di University of Southern California, Los Angeles. Sejak tahun 1982 hingga sekarang menjadi dosen di Fisipol UGM dan pada Program S2 Magister Administrasi Publik mengampu mata kuliah Kewirausahaan Sektor Publik. Gelar Guru Besar diraihinya pada tahun 2003 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIPOL) UGM. Pengalaman selain dosen antara lain Ia menjadi Direktur Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan pada 1995-2003 dan Kepala Departemen Administrasi Publik UGM pada 1993-1998. Di lingkup organisasi, Agus menjadi Ketua Perhimpunan Sarjana Administrasi Indonesia wilayah Yogyakarta (1995-sekarang), Anggota Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (1996-sekarang) dan anggota Asosiasi Kependudukan Amerika (2000-sekarang). Sejak tahun 2007 hingga sekarang menjadi sekretaris Badan Pelaksana Harian Magister Administrasi Publik (MAP) UGM. Sejak tahun 2008 hingga sekarang menjadi senior consultant GTZ Jakarta. Prof. Agus Dwiyanto menulis beberapa buku, salah satunya buku setebal 472 halaman, yang berjudul Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi.

Prof. Dr. Said Zainal Abidin, MPIA

Prof. Dr. Said Zainal Abidin, kelahiran Sigli, Aceh, 21 Januari 1942 adalah Guru Besar Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN). Said Zainal menyelesaikan Sarjana Ekonomi di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 1969 dan menjadi dosen di Unsyiah. Kemudian ia melanjutkan pendidikan S2 di GSPIA, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pa, USA, selesai tahun 1983 kemudian pada perguruan tinggi yang sama ia menyelesaikan S3 tahun 1986. Said Zainal pernah menjadi Anggota DPRD-GR Daerah Istimewa Aceh, 1970-1971 dan Anggota DPR RI, 1971-1977. Di bidang Pemerintahan Said Zainal pernah menjadi Kepala Bidang Administrasi Perusahaan Negara LAN, Kepala Pusat

Diklat Teknik Manajemen LAN, Staf Ahli Menteri PAN, Assisten Menko Wasbang PAN dan saat ini dipercaya sebagai Penasehat Komisi pemberantasan Korupsi (KPK). Said juga aktif menulis diantara karyanya yang sudah dipublikasikan adalah Perspektif Baru dalam Sistem Pengelolaan Pemerintahan, Reformasi Administrasi dan Pembangunan Nasional, Dinamika Pembangunan dan Revitalisasi Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik.

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, lahir di Sawang Manei Aceh Barat pada tanggal 27 Oktober 1970, sekarang tinggal di Perumnas Indiser No. 7 D Tanjung Selamat Darussalam. Pembantu Rektor IV IAIN Ar-Raniry ini diangkat menjadi Guru Besar (Professor) termuda dalam bidang Ilmu Hukum Islam (Fiqh) pada Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh sejak 1 Maret 2005. Beliau mengenyam pendidikan dasar dan menengah di Aceh Jaya dan Aceh Barat, S1 Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Program Pasca Sarjana (S2) IAIN Ar-Raniry dan Program Doktor (S3) bidang Ilmu Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung. Berbagai penelitian telah beliau lakukan dan telah menerbitkan beberapa buah buku yang sangat bermanfaat bagi khazanah keilmuan.

Husni Bahri TOB, SH, MM, M.HUM

Husni Bahri TOB dilahirkan di Takengon pada 5 Januari 1951. Menyelesaikan gelar sarjananya di Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala. Melanjutkan study pada program pasca sarjana di Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala. Dan juga melanjutkan study pada program pasca sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Kasi Penerangan, Kasi Sekretariat dan Kabag di Dinas Peternakan Provinsi Aceh. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Aceh, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Setwilda Aceh. Karir beliau berlanjut, pernah menjabat sebagai Kadispora Provinsi Aceh, Pj. Bupati Bener Meriah, Asisten Tata Praja Setdaprov Aceh, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh. Saat ini masih mengabdikan sebagai Widyaiswara Utama LAN RI.

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATKER 680612
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (PKP2A IV LAN)
NOMOR : 482/PIV.1.1.3/ PPP.01.3/2012

TENTANG
TIM PELAKSANA SEMINAR REFORMASI BIROKRASI MENUJU TATA
KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. H. Dermawan, MM	Penanggung Jawab
2.	Ir. Faizal Adriansyah, M.Si	Ketua
3.	Drs. Syahrial	Sekretaris
4.	Dra. Dian Susianti, M.Si	Anggota
5.	Ervina Yunita, S.Si	Anggota
6.	Henri Prianto Sinurat, S.IP	Anggota
7.	Odywansa, A.Md	Anggota
8.	Syahrul, A.Md	Anggota

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 1 Oktober 2012

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Pusat Kajian dan Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur IV
Lembaga Administrasi Negara (PKP2A IV LAN)

Drs. H. Dermawan, MM
NIP: 19590126 198303 1 005

**JADWAL KEGIATAN SEMINAR
REFORMASI BIROKRASI MENUJU
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Banda Aceh, 1Nopember 2012**

Waktu (WIB)	Materi	Keterangan
08.30-09.00	Registrasi Peserta	Panitia
09.00-09.45	Pembukaan	Protokol Dra. Dian Susanti, M.Si
	Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an	M. Furqan, A.Md
	Laporan Penyelenggaraan Kepala PKP2A IV - LAN	Drs. H. Dermawan, MM
	Sambutan Kepala LAN	Prof. DR. Agus Dwiyanto, MPA
	Sambutan Gubernur Aceh Sekaligus Membuka Acara	Sekda Aceh
	Pembacaan Doa	Ir. Faizal Adriansyah, M.Si
09.45-10.00	Coffe Break	Panitia
10.00 - 11.15	Panel Diskusi	Moderator Mawardi Ismail, SH, M.Hum
10.00-10.25	<i>Topik 1: Evaluasi Kritis Reformasi Birokrasi Di Indonesia.</i>	Prof. DR. Agus Dwiyanto, MPA (Kepala LAN)
10.25-10.50	<i>Topik 2: Korupsi Mencederai Reformasi Birokrasi.</i>	Prof. DR. Said Zainal Abidin, MPIA (Penasehat KPK)
10.50-11.15	<i>Topik 3: Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi dari Perspektif Islam</i>	Prof. DR. Syahrizal (Guru Besar IAIN Ar-Raniry)
11.15-12.45	Diskusi	Moderator Mawardi Ismail, SH, M.Hum
12.45-selesai	Penutupan/Makan Siang	Panitia

